

BAB I

PENDAHULUAN

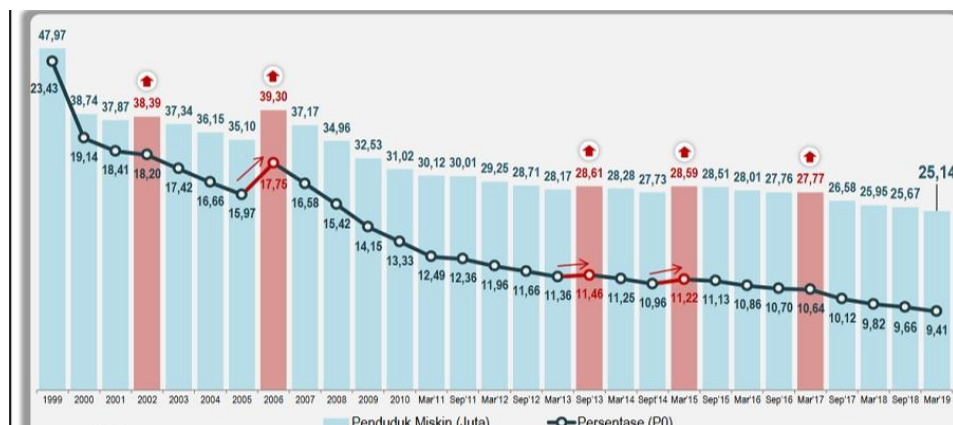
1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diperdebatkan lebih lanjut dalam sebuah forum. Lebih lanjut Ambok mengungkapkan kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan (Ambok, 2018). Oleh karena itu kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang mendasar dalam pencapaian pembangunan suatu negara, selain itu kemiskinan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh negara berkembang seperti negara Indonesia (Magfira & Saharuddin, 2022).

Jika berbicara tentang kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data Kominfo Badan Pusat Statistik pada tahun 1999 sampai dengan Maret 2019 angka kemiskinan di Indonesia mengalami instabilitas. Secara keseluruhan selama 20 tahun angka kemiskinan di Indonesia mengalami lima kali kenaikan. Sebagaimana yang tertera pada gambar berikut (Kominfo BPS, 2019).

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1999-2019



Sumber: Kominfo Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Lebih lanjut jika mencermati gambar tersebut pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Akan

tetapi pada tahun 2002 angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,52 yang semula 37,87 menjadi 38,39. Pada tahun 2003 mengalami penurunan secara bertahap akan tetapi pada tahun 2006 mengalami kenaikan angka kemiskinan secara signifikan sebesar 4,20 yang sebelumnya 35,10 menjadi 39,30. Pada tahun 2007 angka kemiskinan di Indonesia melandai kembali sampai bulan Maret 2013 dan akhirnya mengalami kenaikan kembali pada bulan September 2013 sebesar 0,44 yang sebelumnya 28,17 menjadi 28,61. Pada bulan Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,86 yang sebelumnya 27,73 menjadi 28,59. Dan kenaikan berikutnya terjadi pada bulan Maret 2017 sebesar 0,1 yang sebelumnya sebesar 27,76 menjadi 27,77 (Kominfo BPS, 2019).

Dikarenakan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia maka pemerintah menyalurkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang disalurkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bantuan bersyarat yang disalurkan kepada Keluarga Miskin. PKH mulai disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Melalui penyaluran bantuan PKH diharapkan dalam jangka panjang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi (Kiwang, 2018). Lebih lanjut PKH diatur oleh peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018. Terdapat 3 komponen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan PKH yakni komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama Program Keluarga Harapan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan taraf kehidupan KPM (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021).

Kecamatan Grabagan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban dan masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan data dari Kecamatan Grabagan, total Keluarga Miskin (KM) penerima manfaat PKH di Kecamatan Grabagan mencapai 1947 jiwa dari total 11 desa yang ada. Yang terdiri dari Desa Ngandong, Dahor, Dermawuharjo, Banyubang, Pakis, Ngrejeng, Ngarum, Waleran, Grabagan, Menyunyur, dan Gesikan (BPS Kabupaten Tuban, 2019). Berikut daftar penerima bantuan PKH di Kecamatan Grabagan pada tahun 2022:

Tabel 1.2
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Grabagan
Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima PKH
1.	Ngandong	319
2.	Dahor	109
3.	Dermawuharjo	100
4.	Banyubang	167
5.	Pakis	144
6.	Ngrejeng	114
7.	Ngarum	55
8.	Waleran	245
9.	Grabagan	311
10	Menyunyur	76
11	Gesikan	307
Total Penerima PKH		1.947

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kecamatan Grabagan, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui jika Desa Dahor tercatat sebagai salah satu desa di Kecamatan Grabagan. Sebanyak 109 masyarakat Desa Dahor terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Dengan total penduduk 1705 jiwa dan sebagian besar wilayahnya berupa ladang sehingga mayoritas masyarakat Desa Dahor bekerja sebagai petani (BPS Kabupaten Tuban, 2019). Dalam pelaksanaan setiap program diperlukan evaluasi, evaluasi program penting dilaksanakan karena dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian program tersebut (Rahmawati & Anggraini, 2017). Seperti halnya evaluasi Program Keluarga Harapan yang perlu dilaksanakan guna melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan” dari program tersebut (Yandra, dkk, 2020).

Sejalan dengan itu, Edwin Satria Permana pada tahun 2012 melakukan evaluasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Saruni. Dari hasil uji hipotesis penelitian menyatakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Saruni berjalan cukup baik dengan hasil 69,80% dari hipotesis awal yang ditentukan yakni 60% (Permana, 2012). Penelitian serupa juga dilakukan Magfira & Erni Saharuddin yang melihat Program Keluarga Harapan dari awal

pertemuan hingga pengecekan KPM PKH berjalan dengan cukup baik. Meskipun masih terdapat kendala dalam proses pencairan bantuan PKH dan kekurangan dalam pemutakhiran data (Magfira & Saharuddin, 2022). Sedangkan penelitian evaluasi Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Ika Ayu Nurrohmah & Tjitjik Rahaju, Program Keluarga Harapan hanya memenuhi indikator responsivitas dari enam indikator yang digunakan dalam mengevaluasi Program Keluarga Harapan (Nurrohmah & Rahaju, 2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan perlu dilakukan secara objektif, *reliable*, dan menghasilkan kemanfaatan dengan rangka perbaikan program PKH dan pengambilan keputusan lebih lanjut (Lazwardi, 2017). Sebagaimana dengan hal tersebut evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Dahor juga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan program tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting, keterbaruan dari penelitian ini terletak pada evaluasi yang digunakan. Yakni menggunakan skema AGIL Talcott Parsons. AGIL merupakan *Adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *integration* (I), dan *Latency* (L) (Wirawan, 2014). Penggunaan skema AGIL dirasa mampu melihat tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan di Desa Dahor. Kemudian akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui pemusatan data penelitian. Seperti mean, median, modus, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk mengetahui lebih lanjut tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan di Desa Dahor. Maka penelitian ini ingin mengkaji terkait “Evaluasi Tingkat Keberhasilan Program Keluarga Harapan dengan Skema Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan Pola di Desa Dahor Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Sejauh mana tingkat keberhasilan Program Keluarga

Harapan dengan skema adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola di Desa Dahor Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan dengan skema adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola di Desa Dahor Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut manfaat teoritis dan manfaat praktis pada penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan terkait evaluasi tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan dengan skema adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola di Desa Dahor Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah wawasan bagi peneliti terkait evaluasi tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan dengan skema adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola di Desa Dahor Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan masukan maupun sumber referensi bagi peneliti mendatang terkait topik penelitian yang sama. Selain itu juga dapat memberikan wawasan kepada para akademisi.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan alternatif keputusan bagi dinas sosial.